

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Kota Banjarbaru

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya. Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat dan isu-isu yang sedang berkembang. Tantangan dan peluang tersebut hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menghambat pengembangan pelayanan, akan tetapi sudah semestinya dijadikan suatu pemicu dalam meningkatkan pengembangan pelayanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, berbagai tantangan yang akan dihadapi beserta peluang pengembangan dalam kurun waktu 2021-2026 yang menjadi fokus perhatian antara lain:

Tabel 2.11 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

Tantangan	Peluang
Kurangnya tenaga ahli mengoperasikan aplikasi system pengelolaan keuangan	Tersedianya jumlah Aparatur Sipil Negara yang cukup
Kurangnya penyelenggaraan Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah	Adanya komitmen Walikota untuk melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; Potensi pembangunan wilayah Kota Banjarbaru dan jumlah aparatur serta banyak kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang harus dipenuhi dan sejalan dengan komitmen kepala daerah untuk peningkatan sumberdaya manusia
Adanya Tuntutan pengembangana aplikasi teknologi informasi di era digitalisasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dari aplikasi SIMDA beralih ke SIPD	Adanya aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah secara online
Adanya tuntutan Penyesuaian regulasi dari pusat terkait kodifikasi dan nomenklatur rekening belanja daerah yang berubah-ubah	Tersedianya aplikasi/database keuangan yang sudah terintegrasi dengan Kementerian yang membidangi
Masih adanya SKPD yang menyampaikan Pergeseran dan perubahan anggaran di luar jadwal kegiatan	Adanya Kepatuhan SKPD terhadap arahan TIM TAPD dan PPKD
Masih kurangnya optimalisasi penyediaan anggaran untuk kegiatan SKPD	Mengakomodasi kebutuhan penganggaran SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Masih kurangnya kecepatan dan kemudahan akses informasi data dan publikasi terkait keuangan daerah	Adanya pelayanan yang akuntabel dan transparan